

# Analisis Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

<sup>1</sup>Elia Puspita Sari Siregar, <sup>2</sup>Tri Indah Sari Siregar, <sup>3</sup>Harry Santana Harahap,  
<sup>4</sup>Akbar Harahap, <sup>5</sup>Nopi Purnomo

<sup>1,2,3,4</sup>institit Teknologi Dan Sains Padang Lawas Utara  
[liap2577@gmail.com](mailto:liap2577@gmail.com), [Triindahsarisiregar@gmail.com](mailto:Triindahsarisiregar@gmail.com), [bayoangin.air@gmail.com](mailto:bayoangin.air@gmail.com),  
[apardomuanharahap@gmail.com](mailto:apardomuanharahap@gmail.com), [nopipurnomo2020@gmail.com](mailto:nopipurnomo2020@gmail.com)

Submit : 30 Nov 2025 | Diterima : 22 Des 2025 | Terbit : 25 Des 2025

## ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil BPBD Padang Lawas Utara secara komprehensif, meliputi landasan hukum pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta program kerja yang dijalankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan observasi. BPBD Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Lembaga ini menjalankan tiga fungsi utama yaitu koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Padang Lawas Utara telah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan dipimpin oleh Kepala BPBD Lairar Rusdi Nasution, S.STP., M.M., didukung oleh sekretariat dan tiga bidang utama. Kantor BPBD berlokasi strategis di Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

**Kata Kunci:** BPBD, Padang Lawas Utara, Penanggulangan Bencana, Struktur Organisasi, Manajemen Bencana

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada ring of fire memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Posisi geografis pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana geologis dan hidrometeorologi seperti gempa, tsunami, banjir, dan longsor.

Kabupaten Padang Lawas Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2007 merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan luas wilayah 3.918,05 km<sup>2</sup> dan topografi bervariasi dari dataran rendah hingga pegunungan, wilayah ini memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Karakteristik iklim dengan tipe hujan equatorial menyebabkan wilayah ini mengalami dua musim kemarau dan dua musim hujan dalam setahun, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi terutama banjir dan tanah longsor.

Merespons kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara membentuk BPBD sebagai perangkat daerah yang khusus menangani urusan kebencanaan. Pembentukan BPBD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini disusun untuk mendukung pemahaman tentang konteks penanggulangan bencana di Indonesia secara umum dan spesifik di Kabupaten Padang Lawas Utara, serta memvalidasi landasan teori, peraturan, dan praktik yang menjadi dasar profil BPBD yang dianalisis. Berikut adalah ringkasan dan analisis sumber-sumber yang digunakan:

### Sumber Peraturan Perundangan

- a. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Dua regulasi ini menjadi landasan hukum utama pembentukan BPBD di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka mengamankan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, terstruktur, dan melibatkan berbagai stakeholder, yang selaras dengan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan yang dijalankan BPBD Paluta.
- b. UU No. 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara: Menyediakan konteks sejarah daerah sebagai kabupaten baru yang perlu menyesuaikan perangkat daerahnya dengan kebutuhan kerawanan bencana.
- c. Perda Paluta No. 8 Tahun 2016 dan Perda No. 01 Tahun 2021: Menetapkan dasar hukum spesifik pembentukan dan perubahan struktur BPBD di daerah, memastikan kesesuaian dengan kebijakan lokal.

### Sumber Data dan Informasi Daerah

- a. BPS Kabupaten Padang Lawas Utara (2024): Memberikan data demografis (penduduk, kepadatan) dan geografis (luas wilayah, administratif) yang menjadi dasar memahami konteks kerawanan bencana.
- b. BMKG Wilayah I Medan (2021, 2024): Menyediakan analisis tipe iklim, prakiraan musim hujan, dan zona kerawanan bencana hidrometeorologi (banjir, longsor) yang menjadi dasar identifikasi potensi bencana di daerah.
- c. Profil BPBD Paluta (2024) dan Struktur Organisasi BPBD (2024): Sumber data primer internal yang menjelaskan secara rinci visi, misi, tugas, fungsi, dan struktur lembaga, yang merupakan objek penelitian utama.
- d. Portal Nasional Data Indonesia dan Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Paluta: Menyediakan data pendukung yang valid dan terpercaya tentang kondisi daerah dan kinerja perangkat daerah.

### Sumber Teori dan Praktik Manajemen Bencana

- a. BNPB (2012, 2020, 2024):
- b. Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendukung program unggulan BPBD Paluta dalam membangun kapasitas masyarakat.
- c. Pedoman Lambang dan Makna Logo BNPB menjelaskan identitas kelembagaan yang diadopsi BPBD.
- d. Informasi tentang tugas dan fungsi BPBD di tingkat nasional digunakan untuk membandingkan dan memvalidasi kinerja BPBD lokal.
- e. Hidayati (2008): Mengusulkan paradigma baru kesiapsiagaan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penanggulangan bencana, yang selaras dengan misi BPBD Paluta meningkatkan kapasitas masyarakat.
- f. Nurjanah dkk. (2012) dan Ramli (2010): Memberikan kerangka teori manajemen bencana yang komprehensif, mencakup siklus pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi – yang sesuai dengan tugas tiga bidang utama BPBD Paluta.
- g. Sudibyakto (2011): Menyajikan analisis tantangan manajemen bencana di Indonesia, yang menjadi dasar pemahaman tentang hambatan yang dihadapi BPBD Paluta (keterbatasan sumber daya).
- h. Pariipurno dkk. (2013): Memberikan pedoman komunikasi publik dalam penanggulangan bencana, yang penting untuk fungsi koordinasi dan pelaporan BPBD.

### Kekuatan dan Keterbatasan Tinjauan Pustaka

- a. Kekuatan: Tinjauan pustaka mencakup rentang yang luas, mulai dari peraturan nasional hingga lokal, data empiris daerah, dan teori manajemen bencana. Semua sumber saling melengkapi dan mendukung tujuan penelitian untuk menggambarkan profil BPBD secara komprehensif.

- b. Keterbatasan: Sebagian besar sumber jurnal dan buku bersifat umum tentang manajemen bencana di Indonesia, sedangkan sumber yang spesifik tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Lawas Utara masih terbatas (hanya ada data dari BPBD, BPS, dan BMKG). Hal ini menyebabkan kurangnya analisis komparatif dengan BPBD di kabupaten lain di Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka yang disusun telah memenuhi tujuan untuk memberikan landasan teoretis, hukum, dan empiris yang kuat bagi penelitian profil BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik dari objek penelitian, yaitu BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik tentang profil, struktur, tugas, fungsi, dan program kerja BPBD.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang BPBD Padang Lawas Utara dan kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan kausal antar variabel, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi  
Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik kantor BPBD, termasuk lokasi, fasilitas, dan sarana prasarana yang dimiliki. Meskipun tidak melakukan observasi partisipatif mendalam, pengamatan terhadap aspek fisik ini penting untuk melengkapi gambaran profil BPBD
2. Penelusuran Online  
Mengingat keterbatasan akses langsung, penelusuran informasi melalui internet juga dilakukan untuk mendapatkan data pendukung, seperti berita tentang penanganan bencana, informasi dari BMKG, dan sumber-sumber online kredibel lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
3. Analisis Data  
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2007.

#### Kondisi Geografis:

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki luas wilayah 3.918,05 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan, 2 kelurahan, dan 386 desa. Ibukota kabupaten berada di Gunung Tua. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan pegunungan. Kondisi geografis yang beragam ini memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain juga meningkatkan kerawanan terhadap bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi.

### **Kondisi Demografis:**

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara pada pertengahan tahun 2024 mencapai sekitar 272.273 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 69 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk didominasi oleh suku Batak Angkola dengan berbagai marga seperti Harahap, Lubis, Siregar, Nasution, Rambe, Hasibuan, Daulay, Dalimunte, Hutasuhut, dan Batubara.

### **Potensi Kebencanaan:**

Dari aspek kebencanaan, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki karakteristik kerawanan yang perlu diwaspadai. Berdasarkan kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, wilayah ini berada pada zona musim dengan tipe hujan equatorial, yang ditandai dengan dua musim kemarau dan dua musim hujan dalam satu tahun. Kondisi ini, dikombinasikan dengan topografi yang berbukit, meningkatkan potensi terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan.

### **SEJARAH PEMBENTUKAN BPBD PADANG LAWAS UTARA**

Pembentukan BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara tidak terlepas dari konteks nasional tentang pentingnya pengelolaan bencana yang sistematis dan terstruktur. Setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan ratusan ribu jiwa, pemerintah Indonesia menyadari perlunya sistem penanggulangan bencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Kesadaran ini melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua regulasi ini mengamanatkan pembentukan BPBD di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai kabupaten hasil pemekaran yang baru dibentuk tahun 2007, segera merespons amanat peraturan perundangan tersebut. Dalam rangka menata perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara membentuk BPBD sebagai salah satu unsur penunjang pemerintah daerah.

Sebagai kabupaten yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi, keberadaan BPBD menjadi sangat penting untuk mengkoordinasikan, mengkomandoi, dan melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terpadu. Sejak pembentukannya, BPBD Padang Lawas Utara terus mengembangkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

### **VISI DAN MISI BPBD**

Sebagai lembaga yang mengemban amanat penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, BPBD Padang Lawas Utara memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi arah dan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **Visi:**

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana menuju pembangunan yang berkesinambungan.

Visi ini mencerminkan cita-cita jangka panjang BPBD untuk membangun masyarakat yang tidak hanya mampu bertahan saat bencana terjadi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk pulih dengan cepat dan bahkan menjadi lebih baik. Kata "tangguh" menunjukkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana. "Mandiri" berarti masyarakat memiliki kemampuan sendiri dalam menghadapi bencana tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Sementara "berkelanjutan" mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan bencana harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak berhenti pada satu titik waktu tertentu.

#### **Misi:**

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu, koordinatif, dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Misi ini menjelaskan bagaimana BPBD akan mewujudkan visinya. Beberapa kata kunci dalam misi ini adalah:

- "Terpadu": mengintegrasikan berbagai aspek dan stakeholder dalam penanggulangan bencana
- "Koordinatif": menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak
- "Berkelanjutan": upaya yang terus-menerus dan tidak temporer
- "Mengurangi risiko": fokus pada upaya preventif dan mitigatif
- "Meningkatkan kapasitas masyarakat": pemberdayaan masyarakat sebagai subjek aktif

### Tugas dan Fungsi

Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun rencana dalam program kerja serta menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah,
2. Melakukan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana daerah
3. Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana daerah
4. Melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan penanggulangan bencana daerah
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

### STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara disusun untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penanggulangan bencana dapat dijalankan secara optimal. Berdasarkan dokumen profil BPBD, struktur organisasi lembaga ini terdiri dari beberapa komponen utama:

#### KEPALA BPBD

Pada puncak struktur organisasi terdapat Kepala BPBD yang saat ini dijabat oleh **Lairar Rusdi Nasution, S.STP., M.M.** Kepala BPBD merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Beliau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### SEKRETARIAT

Di bawah Kepala BPBD terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Jabatan Sekretaris saat ini dipegang oleh **Muhammad Asypan Addawai, S.Sos.** Sekretariat bertugas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan umum kepada seluruh unit kerja di BPBD.

#### BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang **Nurmaynides, S.KM.** Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab dalam upaya-upaya prabencana.

#### BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang **Khairuddin Harahap, SH.** Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan ujung tombak dalam penanganan situasi darurat bencana.

#### BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang **Ichwan Saputra Siregar, ST.** Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas dalam fase pemulihan pascabencana

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penanggulangan bencana - dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan -

dapat dikelola dengan baik oleh unit-unit yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang jelas.

## **BENTUK, MAKNA, WARNA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Bentuk**

Lambang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbentuk

Lingkaran Dan Terdiri Dari :

1. segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna oranye
2. lingkaran berwarna merah putih dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan yakni:

1. Tulisan BADAN NASIONAL dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah
2. Tulisan PENGGULANGAN BENCANA dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih

### **Makna**

Makna dari bagian-bagian lambing

1. secara keseluruhan lambang BNPB yang bentuk lingkaran tersebut menggambarkan perasai. melambangkan “Ketangguhan Bangsa Dalam menghadapi Bencana”
2. segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye,
3. melambangkan misi BPBD, yakni:
  - a. Melindungi Bangsa dari Ancaman Bencana melalui pengurangan Resiko;
  - b. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal;
  - c. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara Terencana,
  - d. Melindungi Bangsa dari Ancaman Bencana melalui pengurangan

### **Warna**

- a. Segitiga berwarna biru, mempunyai makna bahwa BNPB sebagai salah satu Lembaga Negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran/target serangan militer.
- b. Warna merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BNPB harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BNPB dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif.
- c. Warna oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BNPB harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Garis Warna hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BNPB harus selalu tampil dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

## **KESIMPULAN**

1. BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2021 dengan landasan hukum yang kuat dari tingkat pusat hingga daerah.
2. Struktur organisasi BPBD terdiri dari Kepala BPBD (Lairar Rusdi Nasution, S.STP., M.M.), Sekretariat, dan tiga bidang utama yang menangani pencegahan & kesiapsiagaan, kedaruratan & logistik, serta rehabilitasi & rekonstruksi.
3. BPBD menjalankan tiga fungsi utama yaitu koordinasi, komando, dan pelaksanaan dengan enam tugas pokok yang mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana.
4. Identitas kelembagaan BPBD tercermin dalam logo yang mengadopsi logo BNPB dengan makna filosofis yang mendalam, melambangkan ketangguhan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam penanggulangan bencana.

BPBD Paluta berlokasi strategis dengan program unggulan desa tangguh bencana dan layanan darurat 24/7, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya

## REFERENSI

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan. (2021). Audiensi Bersama Kepala BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Medan: BMKG Wilayah I. Diakses dari <https://bmkg.go.id/berita/audiensi-kepala-bpbd-padang-lawas-utara>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan. (2024). Prakiraan Musim Hujan 2024/2025 Zona Musim di Sumatera Utara. Medan: BMKG Wilayah I Medan. Diakses dari <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-musim.bmkg>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Jakarta: Direktorat Kesiapsiagaan BNPB. Diakses dari <https://bnpb.go.id/publikasi/pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Pedoman Lambang dan Makna Logo BNPB. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB. Diakses dari <https://bnpb.go.id/tentang-bnpb/lambang-bnpb>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Tentang BNPB - Sejarah BNPB. Diakses dari <https://bnpb.go.id/tentang-bnpb> pada tanggal 15 Desember 2024.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Tugas dan Fungsi BPBD. Diakses dari <https://bnpb.go.id/bpbd> pada tanggal 15 Desember 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. (2024). Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2024. Gunung Tua: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara. Diakses dari <https://padanglawasutarakab.bps.go.id/publication.html>
- BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara. (2024). Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Gunung Tua: BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara. Dokumen Internal.
- BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara. (2024). Struktur Organisasi BPBD. Diakses dari <http://bpbd.padanglawasutarakab.go.id> pada tanggal 16 Desember 2024.
- Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 3 No. 1, hlm. 69-84. Diakses dari <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/139>
- Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Penerbit Alfabeta. ISBN: 978-602-8800-27-2.
- Paripurno, E. T., et al. (2013). Panduan Komunikasi Publik Badan Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB. Diakses dari <https://bnpb.go.id/uploads/24/publikasi/panduan-komunikasi-publik.pdf>
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8. Gunung Tua: Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1. Gunung Tua: Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. (2024). Profil Kabupaten Padang Lawas Utara. Diakses dari <https://padanglawasutarakab.go.id/profil> pada tanggal 15 Desember 2024.
- Portal Nasional Data Indonesia. (2024). Data Kabupaten Padang Lawas Utara. Diakses dari <https://data.go.id/dataset/kabupaten-padang-lawas-utara> pada tanggal 16 Desember 2024.
- Ramli, Soehatman. (2010). Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management). Jakarta: Dian Rakyat. ISBN: 978-979-598-261-6.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39239/uu-no-24-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39279/uu-no-37-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4878/pp-no-21-tahun-2008>
- Sudibyakto, H. A. (2011). Manajemen Bencana di Indonesia ke Mana? Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN: 978-979-420-879-3